



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 031 /KMA/SK/II/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI
TAHAP KETIGA**

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 030/KMA/SK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketiga.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Ketiga tahun 2011 dan terselenggaranya Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KETIGA TAHUN 2011.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketiga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Pokja :

- a. Pokja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pokja Peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketiga bertugas melaksanakan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan, dan mempersiapkan Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Ibu Kota Propinsi dan Pengadilan Tinggi secara bertahap ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pokja dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ;

KEEMPAT : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Ketiga ;

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mahkamah Agung RI ;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Februari 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
Nomor : 031/KMA/SK/II/2011 Tentang
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim
Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi Tahap Ketiga.

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KETIGA**

I. Pokja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

A. Penyusun Naskah Ujian, Memeriksa dan Menentukan Kelulusan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Djoko Sarwoko, SH. MH.	Ketua Muda Pidana Khusus	Ketua
2.	Suhadi, SH. MH.	Panitera Mahkamah Agung RI	Sekretaris
3.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.	Ketua Muda Pidana	Anggota
4.	Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.	Ketua Muda Pengawasan	Anggota
5.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
6.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
7.	H. Muhammad Taufik, SH. MH.	Hakim Agung	Anggota
8.	Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH.	Akademisi	Anggota
9.	Dr. Bambang Widjayanto, SH. LLM.	Praktisi Hukum	Anggota
10.	Dr. Suharto, SH. MH.	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Lukman Bahmid, SH. MH.	Tokoh Masyarakat	Anggota

Tugas :

1. Membuat/Menyusun soal-soal ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Memeriksa/mengkoreksi jawaban hasil ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Melaksanakan tes wawancara/tes lisan bagi Peserta yang telah lulus ujian tertulis.
4. Menentukan kelulusan Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penyelenggara dan Pengawas Ujian Tertulis.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Ketua
2.	Lilik Srihartati, SH., MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Sekretaris
3.	Suhadi, SH. MH.	Panitera Mahkamah Agung RI	Anggota
4.	HR. Anton Suyatno, SH. MH.	Sekretaris Kepaniteraan	Anggota
5.	Zarof Ricar, SH. S.Sos. M.Hum.	Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
6.	H. Machmud Rahimi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	H. Sunaryo, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
8.	Nurhadi, SH. MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
9.	Drs. H. Aco Nur, MH.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
10.	Dermawan S Djamian, SH. MH. CN.	Kepala Biro Keuangan	Anggota

Tugas :

1. Membawa soal ujian tertulis dan kelengkapannya ke Daerah (Pengadilan Tinggi yang bersangkutan).
2. Menyelenggarakan dan mengawasi ujian tertulis di Pengadilan Tinggi.
3. Membawa kembali soal ujian dan lembar jawaban untuk diserahkan pada pemeriksa ujian di Mahkamah Agung RI.

II. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.	Ketua Muda Pidana	Ketua
2.	Sumarni Marzuki, SH. MH.	Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	Sekretaris
3.	Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.	Ketua Muda Pengawasan	Anggota
4.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
5.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
6.	H. Muhammad Taufik, SH. MH.	Hakim Agung	Anggota
7.	H. Anwar Usman, SH. MH.	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil	Anggota
8.	I.Gusti Agung Sumanatha, SH. MH.	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Peradilan	Anggota
9.	Nurhadi, SH. MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota

Tugas :

1. Menyusun Kurikulum Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

III. Pokja Peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.	Ketua Muda Pembinaan	Ketua
2.	Lilik Srihartati, SH. MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Sekretaris
3.	Moegihardjo, SH.	Hakim Agung	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
4.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
5.	Drs. H. M. Rum Nessa, SH. MH.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Anggota
6.	Drs. Hariri YS. SH. MM. MH.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
7.	Dermawan S Djamian, SH. MH. CN.	Kepala Biro Keuangan	Anggota
8.	Drs. H. Aco Nur, MH.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota
9.	Siti Nurjanah, SH. MH.	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Anggota
10.	Ardaning Sandrawati, SH. M.Pd.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Tugas :

1. Mempersiapkan Tata Naskah Usulan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden RI.
2. Mempersiapkan Tata Naskah peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Mempersiapkan peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

[Handwritten signature]

Lampiran II : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
Nomor : 031 /KMA/SK/II/2011 Tentang
Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim
Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi Tahap Ketiga.

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN TINGGI
TAHAP KETIGA**

Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Lilik Srihartati, SH. MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Koordinator
2.	M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi	Sekretaris
3.	Sardiyono, SE. M.Pd.	Kepala Bagian Perbendaharaan	Anggota
4.	Sri Kamala Dewi, SH	Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan	Anggota
5.	Ramdani Dudung, SH	Kepala Bagian Urusan Dalam	Anggota
6.	Siti Kholisoh, SH.	Kasubdit Kasasi Pidana Khusus	Anggota
7.	Sutisna, S.Sos. M.Pd.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran	Anggota
8.	Hanifan Hidayatulloh, SH.	Kepala Bagian Keamanan	Anggota
9.	Azkia Kusumastuti, SE.	Kepala Sub Bagian Akuntansi IB	Anggota
10.	Eko Nugroho, SH.	Koordinator Pidana Khusus Kasasi	Anggota
11.	Ogan Sudradjat, SH.	Koordinator Pidana Khusus PK dan Grasi	Anggota
12.	Subagyo, BA.	Kepala Sub Bagian Rencana Anggaran II	Anggota
13.	Fany Widia, SE.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana	Anggota
14.	Asep Nursoba, S.Ag.	Hakim Yustisial/Koord. Manajemen Perkara	Anggota
15.	Kosidah, SH.	Staf Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
16.	Wardhani, SH.	Staf Kepaniteraan	Anggota
17.	Prayoga Nurjaya, S.Kom.	Staf Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
18.	Ahmad Syaiful, S.Kom.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
19.	Hanan Tauqiefie, SE.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
20.	Citra Maulana, S.Kom.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
21.	Agus Sudarmanto, S.Kom.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
22.	Kartika Sandi Taurus, A.Md.	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
23.	Dwi Listiani, A.Md.	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota

Tugas :

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pokja dalam rangka terselenggaranya Seleksi Calon Hakim Ad Hoc dan peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.